

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri.
- Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Cv. Alfabeta.
- Conyers. 1991. *An Introduction To Social Planning In The Third World*. By Jhon Wiley & soons Ltd, 1994. *Terjemahan Drs.Susetiawan. SU: "Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press (xi, 335 hal).
- Elzafina. 2011. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Melalui Peran Fasilitator Musrenbang di Kota Solok*.
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UMM Press.
- Juliantara, Dadang. 2004. *Pembaruan Kabupaten Arah Realisasi Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri.
- Ketaren, Nurlela. 2009. *Administrasi Pembangunan*. Medan.
- Nasution, Arifin. 2008. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Medan : FISIP USU Press.
- Nasution, Arifin. 2007. *Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010*.
- Nurcholis, Hanif. 2008. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT.Grasindo.
- Oakley, Peter, et.al. 1991. *Projects with people, The Practice of Participation in Rural Development*. Geneva : International Labour Office.
- Pasaribu, Jhonson. 2010. *Proses Perencanaan Pembangunan Melalui Peranan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi*.
- Poerwodarminto, W. J. S. 2004. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Siagian, Sondang.P. 1980. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.
- Singarimbun, Masri, Effendi Sofyan, 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.

- Sjafrizal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Padang : Baduose media.
- Soekartiwi. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan Dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.
- Supriyatno, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang : Cv. Media Brilian.
- Terry, George R. 1991. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Todaro, Michael,P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.s
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Wiyoso, Yonatan, Sadu Wasistiono. 2009. *Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung : Fokus Media.

#### **Sumber Lain :**

- Modul Bahan Diskusi Publik Seri Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan Daerah, Jakarta, 2007.
- Buku Panduan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2008.
- Modul Bahan Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan Daerah., USAID LGSP, Jakarta, 2008.
- International Journal Workshop On Enlarging Citizen Participation and Increasing Local Autonomy in Achieving Societal Harmony Workshop, Network of asia-Pacific Schools and Institutes of Public Administration and Governance (NAPSIPAG) Annual Conference, Beijing, 2005. page 4.*

*International Journal Of Administrative Science & Organization, Departement Of Administration Sciences, Faculty Of Social and Political Science, Airlangga University, Surabaya, 2013. page 12.*

Buletin Bakohumas Kabupaten Dairi. 2009. Edisi khusus 2009. halaman 4.

Metro Siantar. 2014. Edisi 9 Desember 2014. halaman 2.

Sidikalang Pos. 2010. Edisi II, 9-16 Maret 2010. halaman 2.

Undang-undang RI No.23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang RI No.32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang RI No.25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang *Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang *Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No. 0008/M.PPN/01/2007, 050/264 A/ SJ tanggal 16 Januari 2008 Tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2008*.

Pemerintah Kabupaten Dairi. 2013. *Dairi Dalam Angka.*: Badan Pusat Statistik Dairi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019*.

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENULIS  
DENGAN PARA INFORMAN**

1. Siapa pihak-pihak yang dilibatkan dan diundang dalam Musrenbang RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019?
2. Apakah para *Stakeholders* yang diundang hadir pada saat Musrenbang RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019?
3. Bagaimana hubungan yang dibina oleh Bappeda Kabupaten Dairi sebagai koordinator dan fasilitator Musrenbang RPJMD dengan para *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Dairi?
4. Mengapa Musrenbang RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 ini perlu dilaksanakan dan apa yang menjadi Payung hukum untuk melaksanakan Musrenbang Penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019?
5. Sasaran atau tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019. Menurut Bapak/ Ibu apa yang menjadi sasaran atau tujuan dari penyusunan RPJMD tersebut?
6. Bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat dalam Musrenbang RPJMD. Menurut Bapak / Ibu seperti apa gambaran bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbang RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 tersebut? Apakah hanya sekedar ikut dalam Musrenbang atau misalnya ada yang memberi ide, gagasan, materi maupun tenaga?
7. Bagaimana Komposisi peserta Musrenbang RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 dan keterwakilan *stakeholders* terutama perwakilan dari masyarakat dan perempuan. Menurut Bapak / Ibu bagaimana keterwakilan masyarakat dalam peserta Musrenbang RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019? Apakah sudah proporsional dan mewakili seluruh elemen termasuk wakil dari perempuan?
8. Pemahaman *stakeholders* mengenai proses penyusunan RPJMD dan negosiasi. Bagaimana proses negosiasi yang terjadi dalam merumuskan keputusan Musrenbang di tengah-tengah dinamika kepentingan antar *stakeholders*? Dan pada saat kapan negosiasi antar pemangku kepentingan itu terlaksana?
9. Tingkat partisipasi dan proses partisipatif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019. Menurut Bapak/ Ibu bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 dan apakah penyusunan RPJMD tersebut sudah mencerminkan proses partisipatif?
10. Kendala-kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat. Dalam mewujudkan partisipasi masyarakat tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala untuk mewujudkannya, jadi menurut Bapak / Ibu apa yang menjadi kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD tersebut?

11. Menurut Bapak/Ibu apa manfaat dari perencanaan partisipatif ini, terutama jika dikaitkan dengan Musrenbang RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019? Apakah hanya sekedar memenuhi syarat administrasi dalam penyusunan *Legal drafting* yang pada akhirnya nanti akan menjadi Perda Tentang RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019?
12. Bappeda Dairi sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi, menurut Bapak apa kira-kira yang menjadi kendala-kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dairi?
13. Apakah hasil Musrenbang Penyusunan RPJMD tersebut benar-benar diakomodir sebagai substansi dalam Perda RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019?
14. Bagaimana Proses Perencanaan Partisipatif yang terjadi dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019? Apakah sudah mencerminkan sesuai dengan Teori Perencanaan Partisipatif dan mekanismenya sesuai dengan landasan hukum yang mengatur mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah?
15. Bagaimana keterkaitan antara Visi dan Misi Bupati Dairi pada saat kampanye dengan rumusan RPJMD kabupaten Dairi Tahun 2014-2019?
16. Apa pentingnya RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 ini bagi para Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi?
17. Bagaimana tingkat pemahaman para *Stakeholders* terhadap Perencanaan Partisipatif dan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019?
18. Mengapa dalam menyusun RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 ini harus melalui proses partisipatif? Dan pada tahap mana partisipasi masyarakat dilibatkan secara utuh?
19. Seperti apa keterkaitan antara dokumen RPJMD Kabupaten Dairi ini dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Dairi Lainnya?
20. Apakah partisipasi masyarakat dalam RPJMD ini hanya menyangkut pelibatan masyarakat sebagai *stakeholders* pada saat Musrenbang saja?
21. RPJMD ini sesungguhnya adalah Produk Hukum secara Politik, apakah dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 tersebut sudah transparan, aspiratif dan dengan tanpa membedakan porsi dari masing-masing para kelompok pemangku kepentingan?
22. Setelah RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 ini rampung dan dituangkan dalam bentuk Perda pada Lembaran Daerah Kabupaten Dairi, selanjutnya bagaimana Peranan Pemerintah Kabupaten Dairi dan Masyarakat terhadap RPJMD tersebut? Apakah wajib disosialisasikan dan dalam pelaksanaannya akan ada evaluasi dan pengawasan dari masyarakat?
23. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Dairi selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang terutama jika dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka 5 tahunan Kabupaten Dairi yang dalam proses penyusunannya dengan melibatkan para *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Dairi?